

No.	Penanya	Pertanyaan/Usulan	Jawaban/Tanggapan
			<p>Roadshow Aktivasi IKD juga pernah dilaksanakan di UGM, dari 800 peserta yang melaksanakan aktivasi, 700 peserta berdomisili Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sedangkan 100 peserta dari Kota Yogyakarta.</p> <p>Untuk menambah cakupan Aktivasi IKD, Dukcapil berencana melaksanakan aktivasi IKD ketika pemilu dengan membuka kantor, agar aktivasi IKD hanya untuk warga kota Yogyakarta.</p> <p>Jawaban Kepala Bidang PIAK :</p> <p>2. Untuk aktivasi IKD perlu scan barcode untuk memastikan verifikasi data apakah benar antara pemohon yang melaksanakan aktivasi dan data pada SIAK</p>
2.	Tyas (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta berterima kasih terkait kerjasama yang terjalin antara Dukcapil Kota Yogyakarta dengan Dikpora Kota Yogyakarta 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memberikan apresiasi terhadap penghargaan yang diterima oleh Dukcapil 3. Dinas Dikpora menyampaikan bahwa dengan adanya regulasi bahwa seluruh dokumen kependudukan terutama KK dapat dicetak dengan kertas A4, bagaimana dapat membedakan KK yang asli dan palsu terutama saat PPDB? 4. Terkait merubah data pada KK, seandainya merubah KK terkait Pendidikan, dapat berubah dari Diploma ke Strata 1. Untuk perubahan pada pekerjaan bagaimana cara merubahnya 5. Terkait cakupan aktivasi IKD, cakupan aktivasi IKD dapat dibantu oleh Dikpora dengan melakukan aktivasi IKD di sekolah dengan 	<p>Jawaban Kepala Dinas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait dokumen berbarcode yang membedakan antara fotokopi dan asli hanya dibedakan oleh tanda tangan basah oleh Kepala keluarga 2. Terkait cakupan Aktivasi IKD, Roadshow sudah dilaksanakan di sekolah, bank dan KPP pratama. Akan tetapi, peserta IKD didominasi oleh luar daerah Kota Yogyakarta. Dinas Dukcapil juga telah melaksanakan sosialisasi dan Dinas Dukcapil telah menerima permohonan aktivasi IKD di seluruh sekolah dan posyandu namun peserta yang melaksanakan aktivasi IKD didominasi oleh penduduk luar kota Yogyakarta 3. Dokumen kependudukan berbarcode dapat diketahui keasliannya pada barcode nya 4. Untuk perubahan status pekerjaan belum bisa dengan IKD hanya bisa melalui JSS. Jika penduduk sudah tidak sekolah, segera update status bahwa sudah tidak sekolah. Jika sudah bekerja, silahkan melampirkan data dukung seperti SK (Untuk PNS). Jika update Pendidikan, dapat melampirkan Ijazah pendukung, selain data pendidikan yang terupdate data pekerjaan juga akan terupdate menjadi pelajar bila masih pada jenjang SD-SMA dan mahasiswa jika pada jenjang perkuliahan

No.	Penanya	Pertanyaan/Usulan	Jawaban/Tanggapan
		<p>melaksanakan aktivasi pada guru-guru</p> <p>6. Tanggapan terkait jawaban Kabid PIAK: Di media massa terdapat kasus pemalsuan KK di daerah lain, walau barcode nya asli tapi isinya diedit sehingga tidak sesuai dengan data pada SIAK. Bagaimana cara pengecekannya</p>	<p>Jawaban Kepala Bidang PIAK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui apakah dokumen kependudukan berbarcode tersebut asli atau palsu dapat melalui scan barcode yang ada di dokumen. Dari barcode tersebut akan masuk dalam laman Kemendagri. Jika terdapat centang hijau maka dokumen asli, jika centang berwarna kuning maka data tersebut asli namun masih berupa data lama dan jika berwarna merah maka data barcode tersebut palsu. 2. Untuk di perbankan bila ingin mengetahui apakah KTP Asli atau palsu maka dapat melalui card reader. KTP asli akan terdeteksi oleh card reader, jika tidak terdeteksi maka bisa jadi KTP palsu atau chip didalam KTP sudah rusak. <p>Tanggapan Sekretaris Dinas:</p> <p>Lembaga pengguna data kependudukan diharapkan melaksanakan PKS dengan Dukcapil terkait kerjasama pemanfaatan data sehingga dapat mengecek di web portal apakah data telah sesuai dengan data pada SIAK.</p>
3.	Danang Dwi Antoro (KUA Gedong tengen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apresiasi terkait layanan perubahan data perkawinan oleh Kemenag dengan Dukcapil melalui inovasi Mantap 2. Terkait dengan IKD, di KUA masyarakat masih terbiasa hanya menggunakan identitas fisik. KUA sudah melaksanakan aktivasi IKD dan meminta telah meminta aktivasi di lingkungan RT. Cakupan Aktivasi IKD mungkin belum maksimal dikarenakan pada beberapa tempat, seperti Bank belum bisa menerima IKD dan hanya menerima identitas fisik. 3. Seperti roadshow yang telah disampaikan, di Kabupaten Sleman, seluruh ASN diwajibkan aktivasi IKD. 4. Masyarakat juga diadvokasi tentang keamanan digital dengan adanya IKD pada Smartphone, jika Smartphone di hack apakah data dari IKD bisa terambil. 5. Dukcapil dapat membuat banner untuk aktivasi IKD di 	<p>Jawaban Kepala Dinas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait aktivasi IKD. KUA bisa mengundang Dukcapil untuk Aktivasi IKD 2. Dukcapil mengapresiasi bahwa KUA dan Posyandu sudah menggunakan IKD, namun justru perbankan belum menggunakan IKD. Hanya BPD yang sudah menerima IKD, Bank Jogja belum <p>Jawaban Kepala Bidang PIAK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait keamanan data pada aplikasi IKD, ketika menggunakan IKD, pemilik IKD harus memasukkan PIN dan Captcha Untuk menjaga keamanan data, Dokumen kependudukan di IKD juga tidak bisa di screenshot Selain itu, Database kependudukan semua sudah tersentral di dirjen dukcapil, namun servernya tidak hanya di Jakarta tetapi terdapat server cadangan di Batam. Selain itu, Secara individu juga harus menjaga keamanan data secara mandiri. Jika Bank meminta data, mohon hanya memberikan data yang diminta jangan mengisi diluar permintaan

No.	Penanya	Pertanyaan/Usulan	Jawaban/Tanggapan
		ruang layanan agar masyarakat dapat mempersiapkan aplikasi IKD sebelum pelayanan.	
4.4	BRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dengan menggunakan IKD ini nasabah yang sudah mendownload, dapat merubah datanya melalui IKD dan apakah bisa langsung terupdate datanya karena sering terjadi ketidaksinkronan data antara bank dan Dukcapil 2. Apakah ada kebijakan IKD untuk menggantikan identitas fisik 3. BRI ingin mengundang aktivasi IKD 	<p>Jawaban Kepala Dinas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan data dapat melalui IKD, bahwa yang belum bisa diupdate hanya data pekerjaan 2. Kebijakan IKD akan diharuskan menggunakan IKD di tahun 2025 karena Transportasi public sudah menggunakan IKD, sehingga perbankan dapat mengikuti 3. Dukcapil siap sedia bila melaksanakan aktivasi IKD <p>Jawaban Kepala Bidang PIAK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika data di KK sudah di update maka di IKD sudah langsung terupdate. Bila terdapat ketidaksinkronan data maka dapat sinkronasi melalui layanan konsolidasi data, nanti akan data balikan bahwa NIK tidak bermasalah
Saran dan Masukan dari Barcode			
5	Irawan Prabowo (Dinsosnakertrans)	Mohon bekerjasama dengan beberapa instansi terkait IKD, seperti perpanjang STNK, SIM dll agar tidak perlu fotocopy KTP untuk persyaratan administrasi. Terima kasih	Terimakasih untuk saran dan masukannya
6	Timbul Indra Hutajulu (KPP Pratama Yogyakarta)	Untuk IKD, pemberitahuan bisa dilakukan lewat WA Blast atau outbound call	Terimakasih untuk saran dan masukannya

Berikut foto dokumentasi Forum Konsultasi Publik atas Standar pelayanan pada Dindukcapil Kota Yogyakarta.







4. Penandatanganan Berita Acara oleh peserta Forum Konsultasi Publik.
5. Forum Konsultasi Publik ditutup oleh sekretaris dinas pukul 12.00 WIB dan dilanjutkan layanan IKD sampai pukul 13.00 WIB.

Yogyakarta, 06 Agustus 2024

Pemimpin Rapat

Dra. Septi Sri Rejeki

NIP. 196809231995032007